

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi, serta untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dari, 2 (dua) sasaran strategis di dapat rata-rata pencapaian kinerja, yaitu : 96 %, dengan perincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan strategis (Padi, Jagung dan Kedele) rata-rata capaian kinerjanya 120 %
2. Meningkatnya populasi ternak besar, kecil dan unggas serta meningkatnya produksi daging rata-rata capaian kinerjanya 72 %

Dengan tercapainya sasaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya yaitu **“Melalui Sektor Pertanian Dan Peternakan Untuk Mencapai Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dengan Mengelola Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Menghasilkan Pangan Nabati dan Pangan Hewani, Meningkatkan Perekonomian Dengan Motivasi Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA)”**